

Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum

Rakhmat Hidayat
Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Tujuan kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pemikiran empat sosiolog yaitu Pierre Bourdieu, Michael W. Apple, Henry Giroux dan Carlos Alberto Torres tentang kurikulum dan menjelaskan definisi kurikulum dalam perspektif sosiologis. Metodologi yang digunakan adalah melakukan kajian pustaka dari buku-buku yang ditulis oleh empat sosiolog tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) negara menjalankan praktek kekuasaannya melalui penggunaan seperangkat mekanisme wacana yaitu dengan pembentukan teks-teks pendidikan untuk menghasilkan berbagai kepatuhan berupa nilai, cara pandang dunia, dan sebagainya. Kurikulum sebagai bentuk kekuasaan digunakan negara dalam memproduksi berbagai cara pandang dunia yang harus sejalan dengan cara pandang negara dan 2) kurikulum merupakan sebuah ruang dimana para agen dengan kepentingan dan modalnya yang berbeda-beda saling bertarung untuk memperjuangkan posisi, pengaruh, prestis dan kedudukan. Perlu dilakukan diskusi dan kajian lebih mendalam tentang kurikulum dalam berbagai aspek. Selama ini kajian tentang kurikulum lebih banyak ditekankan pada kajian pedagogik yang lebih menempatkan kurikulum sebagai kajian mikro.

Kata kunci: *kurikulum, sosiologi, kontestasi, dan kekuasaan*

Abstract: This article aims to explain the thinking of four sociologists: Pierre Bourdieu, Michael W. Apple, Henry Giroux and Carlos Alberto Torres about the curriculum and explains the definition of curriculum in sociological perspective. The methodology used is by conducting literature review of books written by the four sociologists. There are two important conclusions in this paper (1) states practice a set of mechanisms of power through the use of discourse that is by forming educational texts to produce a variety of compliance in the form of values, worldview, and so forth. Curriculum as a form of state power is used in producing various world outlook which should be in line with the state perspective, (2) curriculum is a space where the agents with the interests and different capital fight each other to fight for position, influence, prestige and position. Need to do more in-depth discussion and review of curriculum in various aspects. The on putting pedagogical studies curriculum as a micro study. So far, the study of curriculum has been emphasizing more.

Key words: *curriculum, sociology, contestation, and power*

Pendahuluan

Kurikulum adalah jantung pendidikan. Pendapat ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan kurikulum dalam ranah pendidikan nasional, karena kurikulum sangat mewarnai konstruksi dan wajah pendidikan suatu masyarakat. Kurikulum bukan sekadar menyangkut substansi dan instruksional pembelajaran yang bermain di level mikro, tetapi kurikulum berkaitan dengan relasi-relasi sosial berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan di belakangnya. Selain berkaitan dengan kepentingan politik penguasa, kurikulum juga berkepentingan dengan relasi antara negara dengan sekolah (melalui representasi guru dan murid), dan relasi sosial antara sekolah dengan

masyarakat. Bahkan relasi dengan pasar atau modal sangat berpengaruh. Aspek kedua yang menkonfirmasi bahwa kurikulum menjadi sangat strategis dalam level makro.

Diskusi tentang kurikulum selalu menarik dikaji seiring dengan pergantian kekuasaan. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka, problem kurikulum sudah menjadi hal serius dalam bidang pendidikan dan pengajaran saat itu. Pun demikian, kolonialisme Belanda juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa semua kurikulum sekolah-sekolah mengacu kepada pola kurikulum di negeri Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum diorientasikan pada kebutuhan tenaga untuk pembangunan sarana produksi atau pelayanan pemerintah bagi

kepentingan pemerintah kolonial (Tilaar, 1995: 252). Istilah yang mengatakan 'ganti menteri ganti kurikulum' rasanya tepat untuk menggambarkan perubahan kurikulum di negeri ini. Kurikulum memang harus selalu dimutakhirkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kurikulum yang permanen melainkan melalui berbagai revisi.

Dengan demikian, penjelasan diatas menggambarkan bahwa dibalik kurikulum selalu terjadi kontestasi kekuasaan (Tilaar, 2003:55). Kontestasi merupakan sebuah bentuk perjuangan dan pertarungan berbagai pihak yang berkepentingan dengan produksi kurikulum. Oleh karena itu, kontestasi kekuasaan dalam kurikulum tak dapat terhindarkan. Dalam kajian sosiologi, tentu saja kurikulum tak dipahami sekadar teknis operasional yang implementatif, tetapi lebih dari itu kurikulum dipahami sebagai *social constructed* yang dibentuk oleh berbagai faktor. Dengan demikian, kurikulum dapat dipahami sebagai ruang dimana di dalamnya terjadi kontestasi kekuasaan antara berbagai aktor yang saling bernegosiasi dalam proses produksi pengetahuan. Implikasinya, kajian tentang kontestasi kekuasaan pada dasarnya merupakan kajian sosiologi.

Pendidikan tentu saja tak dipahami sebagai *transfer of knowledge* dan *transfer of value* an sich. Kajian tentang kurikulum sejauh ini banyak dilakukan dalam beberapa tema lebih spesifik. *Pertama*, studi kurikulum dengan menggunakan pendekatan pedagogis, yaitu menekankan pada aspek teknis-instrumental dalam bentuk implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Studi ini banyak dilakukan kalangan yang berkecimpung langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Arah pendekatannya pada level mikro. *Kedua*, studi kurikulum dilakukan dalam tema sekitar *hidden curriculum* (Seda, 1987; Adnan 1992; Fibra, 2002). *Hidden curriculum* dalam praktek pendidikan banyak dilakukan oleh sekolah melalui berbagai kegiatan di luar pembelajaran formal dalam kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan upacara bendera, penanaman disiplin.

Di luar itu, studi-studi yang membahas kurikulum sebagai konstruksi sosial-politik masih relatif terbatas. Kedua arah kajian tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu dengan lainnya. Tulisan ini ingin menjelaskan pemikiran beberapa

sosiolog dalam menjelaskan kurikulum. Beberapa sosiolog yang konsen dengan kajian tentang kurikulum yaitu Michael Apple, Pierre Bourdieu, Henry Giroux, Carlos Alberto Torres. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menjelaskan benang merah pemikiran mereka tentang kajian kurikulum. Melalui tulisan diharapkan semakin memperkaya kajian kurikulum dalam berbagai aspek. Oleh karena *outputnya* adalah adanya pengembangan kurikulum dalam praktek pendidikan di Indonesia. Secara singkat, perumusan masalah tulisan ini adalah: 1). Bagaimana pemikiran beberapa sosiolog (Apple, Bourdieu, Giroux dan Torres) dalam menjelaskan kurikulum? 2). Bagaimana definisi kurikulum dalam perspektif sosiologis?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan: 1) beberapa pemikiran sosiolog tentang kurikulum dan 2) definisi kurikulum dalam perspektif sosiologis

Kajian Literatur

Definisi Kurikulum dan Pembahasan

Membicarakan kurikulum dalam konteks pendidikan di negeri ini memang menjadi menarik tatkala kita bisa menarik ke belakang bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia didesain dan melacaknya dalam dinamika sosial politik hingga hari ini. Dengan demikian, topik kurikulum sebenarnya bukanlah entitas yang tunggal, melainkan entitas yang memiliki berbagai setting baik sosial, politik, ekonomi yang memungkinkan sebuah kurikulum tercipta. Kurikulum menjadi bagian yang sangat signifikan dalam proses pendidikan nasional.

Istilah kurikulum sudah dikenal sejak tahun 1820 (Karhami, 2000:281). Sejarah keberadaan kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun aritmatika sebagai ringkasan belajar yang didalamnya mencakup geometri, astronomi, solid geometri dan hardnami. Semua itu terkait dengan pelajaran matematika. Namun demikian, meski Plato mengintrodusir konsep kurikulum, tetapi sejarah kurikulum mulai masuk ke sekolah dapat ditelusuri pada abad ke-16. Seperti yang ditulis Hamilton, tatanan alam/bumi saat itu termasuk ilmu-ilmu alam sangat berpengaruh terhadap terciptanya kurikulum saat itu (Alkin, Malkin, 1992:277). Dua faktor yang cukup penting dalam

periode tersebut adalah *renaissance* dan revolusi sains. Selain itu, Hamilton juga mengatakan bahwa peran Descartes sangat besar dalam mengkonstruksi kurikulum. Dia mengatakan:

"the specialization and modern views that the natural order of the curriculum is not to be found in knowledge but in the biological and psychological makeup the learner."

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin yaitu *currere* yang berarti *to run* (menyelenggarakan). Atau *to run the course* (menyelenggarakan suatu pengajaran). Beberapa tokoh pendidikan lainnya menjelaskan kurikulum sebagai *the course of study* (materi yang dipelajari). Definisi serupa juga diungkapkan dalam *School Dictionary 3* yang menyebut kurikulum sebagai *"all the courses of study offered at a school, college, or university"* (Levey, 1993:299). Tokoh-tokoh lainnya seperti Hutchins, R.M (1936), Bestor A (1956), Phenix, PH (1962) memberikan definisi kurikulum sebagai:

"the curriculum must consist essentially of disciplined study in five great areas: local language, mathematics, science, history, foreign languages"

Sebagian lainnya juga menganggap bahwa kurikulum sebagai produk. Meski menjadi perdebatan dikalangan dunia pendidikan, namun menarik tatkala sintesis yang muncul dalam perdebatan tersebut adalah pengertian kurikulum sebagai *planned and unplanned (hidden) curriculum-technical and practical learnings*. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (pasal 1) yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan"

Definisi tersebut mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 yang menjelaskan kurikulum sebagai "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu" (Depdiknas RI, 2003:7). Rumusan ini menunjukkan adanya dua dimensi pokok kurikulum yaitu produk dan proses, yang secara keseluruhan mencakup aspek materi (*content*), pengalaman siswa (*experiences*), tujuan kegiatan belajar-mengajar (*objectives*), dan hasil kegiatan belajar-mengajar (*outcomes*) (Silverius, 2004:27).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam studi ini kurikulum tidak dipahami secara tradisional semata-mata sebagai hal-ihwal teknis dari proses pendidikan. Sebagaimana dinyatakan Apple seperti dikutip Tilaar (2003:106) bahwa kurikulum merupakan upaya untuk melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antargenerasi dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kurikulum merupakan sebuah ruang di mana di dalamnya terjadi pertarungan antarkekuasaan dan antaraktor yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi sekaligus mereproduksi berbagai pengetahuan yang terkandung dalam bangunan kurikulum tersebut. Adanya pertarungan yang melibatkan berbagai aktor terjadi karena adanya aktor tertentu yang berkeinginan untuk mempertahankan dominasi dan pengaruhnya melalui kurikulum dalam sistem pendidikan. Hal itu dituturkan Apple (1990:x):

"...it is important to realize that while our educational institutions do function to distribute ideological values and knowledge. As a system of institutions, they also ultimately help produce the type of knowledge (as a kind of commodity) that is needed to maintain the dominant economic, political, and cultural arrangements that now exist."

Sejarah Kurikulum di Indonesia

Sejarah kurikulum di Indonesia dapat dilacak keberadaannya pada masa pra kolonial. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan

Buddha pada abad ke-5 masehi (Kusumo, 2004:219-220). Saat itu proses pendidikan telah berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana. Proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kedua ajaran agama tersebut. Saat itu, meski tidak tersedia dalam sebuah rencana namun bahan pengajaran dimiliki oleh para pendeta maupun biksu. Lihat misalnya, pada saat Kerajaan Sriwijaya mengalami kemasyuran dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Hal yang sama dialami pada zaman Majapahit (Abad 14-16). Saat itu pendidikan tak diselenggarakan secara massal seperti zaman Sriwijaya. Akan tetapi diberikan secara terbatas oleh beberapa guru dan kelompok murid dalam satu padepokan. Pada masa itu pendidikan telah diberikan dari tingkat dasar, lanjutan hingga tinggi. Meski tidak dilakukan secara formal, tetapi para guru yang mengajar memiliki rencana pengajaran yang berkisar pada berbagai pengetahuan yang bersifat umum dan juga khusus untuk menopang kehidupan kesehariannya.

Pada zaman kolonial, kurikulum mengalami beberapa perubahan. Kurikulum pada zaman kolonial ketika VOC bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga-tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Waktu itu beberapa jenis pendidikan yang tersedia meliputi pendidikan dasar, sekolah latin (*latijnsche school*), pendidikan teologi (*seminar theologicum*), akademi pelayaran (*academie der Marine*) (Suryana, 2004:226). Pada akhir 1818, pada masa Daendels dikeluarkan peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah rendah. Isinya hanya mengenai ketentuan-ketentuan tentang pengawasan, pengajaran, namun tidak menyinggung perluasan pengajaran bagi golongan pribumi.

Sistem pendidikan saat itu menekankan kurikulum yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan mengisi lowongan kerja dalam administrasi modern, dengan gaji dan hasil yang lebih baik. Saat itu kurikulum pengajaran yang diwajibkan pemerintah kolonial adalah pengetahuan umum (Bahasa Belanda, sastra, dan berhitung). Materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum terutama dikonsentrasikan kepada menulis, membaca, dan menghitung. Sejak 1842,

berkembanglah apa yang dikenal *indologie*. *Indologie* dipahami sebagai suatu bagian dari ilmu oriental yang dikembangkan untuk tujuan menyiapkan bekal pengetahuan tentang masyarakat negeri jajahan bagi calon administrator yang akan bertugas di Hindia-Belanda (Zed, 2006:57).

Setelah Indonesia merdeka, melalui BP-KNIP merekomendasikan untuk melakukan perubahan mendasar kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ide ini direalisasikan dengan pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran, salah satu diantara tugasnya adalah menyusun sistem persekolahan pada tahun 1947. Ini merupakan kurikulum pertama yang diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan. Kurikulum ini mengacu kepada keluarnya Undang-Undang No. 4 tahun 1950 yang merumuskan pula tujuan kurikulum menurut jenjang pendidikan. Saat itu menteri pendidikannya adalah Mr. Soewandi. Sayangnya, karena masih dalam revolusi fisik maka rencana pelajaran 1947 itu belum dapat dilaksanakan dan baru dapat dilaksanakan lagi pada 1952, yang tertuang dalam UU No. 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Disinilah kemudian melahirkan Kurikulum 1950 yang kemudian digantikan dengan Kurikulum 1958.

Fase berikutnya, kurikulum pendidikan nasional menyesuaikan diri dengan Keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 yang merumuskan mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari pada sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua kurikulum pengajaran harus menginduk kepada keputusan itu yang dituangkan melalui Keputusan Presiden RI No. 145/Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan mengenai pembinaan manusia Indonesia.

Kurikulum mengalami dinamika baru ketika Orde Lama tumbang dan Orde Baru mengambil alih kekuasaan negara. Melalui Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan dirumuskan mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti

yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isinya. Tahun 1975, kurikulum kembali diperbaharui. Diantaranya melalui dibentuknya Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran (BP 4) yang dipimpin oleh H.S Adam Bachtiar (Tilaar, 2003:257). Usaha lainnya dilakukan dengan Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM). Kurikulum pada periode ini cenderung diarahkan pada pembangunan dan kemajuan (*development and progress oriented*) sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang. Pada 1973 lahirlah GBHN yang pertama sebagai Keputusan MPR No. II/MPR/1973 yang melahirkan Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan pada saat bangsa Indonesia berjuang untuk memantapkan pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada saat Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan Nasional, kurikulum terjadi perubahan yaitu masuknya unsur kebudayaan dalam pendidikan nasional. Saat itu, muncul konsep mengenai pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan moral serta estetika. Kepemimpinan Daoed Joesof dikenal dengan Kurikulum 1984 yang menggantikan Kurikulum 1975. Kurikulum 1984 disusun setelah pemerintahan Orde Baru berjalan dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. Banyak kebijakan yang dikeluarkan demi memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kurikulum 1984 terus direvisi. Hasilnya, Kurikulum 1994 menjadi acuan saat itu. Kurikulum ini terkait dengan lahirnya UU Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka terhitung Tahun Pelajaran 1994/1995, kurikulum ini resmi diterapkan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1994, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998) menetapkan kurikulum yang dikenal *objective based curriculum*. Kurikulum 1994 secara jelas merupakan alat negara untuk menderivasi rumusan GBHN yang menjelaskan bahwa

Indonesia sedang mengalami Pembangunan Jangka Panjang II atau dianggap sebagai masa Kebangkitan Nasional ke-2. Semangatnya, hendak diorientasikan kepada pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK.

Setelah itu berubah lagi pada masa Abdul Malik Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004). Sejak awal 2001 disusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menggantikan Kurikulum 1994. Semangat KBK terinspirasi dari UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Saat itu ada tiga kebijakan penting yang termuat dalam KBK yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) (Depdikbud, 1994:1).

Pada tahun 2006, ketika Prof. Dr Bambang Sudibyo sebagai Mendiknas disahkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan (dan No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan/SKL). Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007, diterapkan di Indonesia. KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberikan peluang untuk mengembangkan dan menetapkan KTSP (St. Kartono 1996).

Selama masa Orde lama berlaku dua kurikulum yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 dan Rencana Pelajaran 1960. Pada masa Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya muncul Kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru, yakni Kurikulum 1994. Kurikulum itu menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru. Setelah Orde Baru diberlakukan Kurikulum 2004 dan KTSP. Secara garis besar perbedaan dan tekanan di masing-masing kurikulum disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kurikulum dalam Pendidikan Indonesia

| No | Kurikulum | Orientasi & Setting Sosial |
|----|--|--|
| 1. | Rencana Pelajaran 1947 | Ini merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia, yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia setelah merdeka. |
| 2. | Rencana Pelajaran 1960 | Kurikulum yang dilaksanakan merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional (mulai dari pra sekolah hingga perguruan tinggi) untuk melahirkan apa yang disebut warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya. Intinya, moral pendidikan nasional adalah Pancasila Manipol/Usdek. |
| 3. | Kurikulum 1968 | Kurikulum ini oleh sebagian pengamat dan praktisi pendidikan dikenal sangat teoritis dan berpola <i>correlated subject curriculum</i> , yaitu mata pelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain walaupun batas demarkasi antarmata pelajaran masih terlihat dengan jelas. |
| 4. | Kurikulum 1975 | Kurikulum yang mulai diterapkan pada Tahun Pelajaran 1976/1977 ini mendekatkan mata pelajaran dengan problem sekitar dan pengorganisasian materi bidang studi dilaksanakan secara integral (<i>integrated curriculum organization</i>). Beberapa mata pelajaran dari rumpun yang sama diorganisasikan secara integral menjadi suatu bidang studi dengan harapan masalah lingkungan dapat didekati secara interdisipliner. Salah satu ciri khas kurikulum ini adalah muatan Pendidikan Moral Pancasila tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran PMP, tetapi juga ditekankan kepada pelajaran IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi) dan pelajaran Pendidikan Agama. |
| 5. | Kurikulum 1984 | Kurikulum ini juga disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Saat itu asumsi yang dibangun adalah kurikulum merupakan wahana belajar-mengajar yang dinamis dan dikembangkan terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum ini berlaku kurang lebih 9 tahun. |
| 6. | Kurikulum 1994 | Kurikulum ini dapat dikatakan terlalu padat sehingga terlalu membebani siswa yang berdampak pada kemerosotan semangat belajar siswa sehingga mutu pendidikan semakin terpuruk. |
| 7. | Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) | Semangat KBK terinspirasi dari UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Saat itu ada tiga kebijakan penting yang termuat dalam KBK yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) |
| 8. | KTSP | Kurikulum ini memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. |

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Kurikulum Dalam Pandangan Sosiolog

Analisis Giroux tentang kontradiksi pendidikan banyak menjelaskan berbagai distorsi terhadap praktik-praktik buruk pendidikan yang berorientasikan efisiensi ekonomis (Giroux, 1992:10). Menurutny terjadi degradasi identitas institusi pendidikan dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan publik menjadi pabrik kuli. Giroux menengarai banyak institusi pendidikan (baik sekolah maupun universitas) yang berubah orientasinya menjadi penyedia birokrat elit

masyarakat dan pendukung kapitalisme modern melalui pasar kerja (Giroux dalam Darder, 2003:121). Kontradiksi ini dalam pemahaman Giroux menjadi kegagalan lembaga pendidikan sebagai tranformasi terciptanya humanisasi kehidupan publik.

Posisi kurikulum—sebagai konsekuensi logis fenomena diatas—distandarisasi oleh negara untuk semua jenjang pendidikan, sertifikasi kelulusan, kenaikan angka akademik, dan kriteria evaluasi pendidikan diletakkan dalam kerangka

kompetensi ekonomis. Lebih spesifik, Giroux melihat kurikulum sebagai sebuah tradisi yang selektif yang menyediakan kebutuhan murid melalui seperangkat pengetahuan untuk memiliki berbagai kebutuhan pragmatis yang akhirnya hanya terjebak pada logika komodifikasi (Giroux dalam McClaren, 1995:31). Dalam hal ini, Giroux melihat negara memiliki peran sangat strategis dalam meregulasi pendidikan. Fenomena kedua yang juga dijelaskan Giroux adalah adanya kekerasan. Kekerasan yang dimaksud Giroux dapat terjadi dalam dua hal. *Pertama*, kekerasan yang dilakukan kelompok dominan kepada kelompok sub ordinat, dalam hal ini kekuatan modal dan pasar kepada berbagai institusi pendidikan. Yang terjadi adalah pasar berhasil mengubah *mainstream* pendidikan di berbagai sekolah dan (universitas) mereka dari yang awalnya produsen pengetahuan menjadi produsen tenaga kerja siap pakai untuk dunia kapitalis. Termasuk manajemen sekolah menjadi model korporat. *Kedua*, kekerasan terselubung yang dimanifestasikan melalui standarisasi kurikulum—oleh negara— kepada guru dan murid. Kekerasan dalam hal ini dioperasionalkan melalui seperangkat mekanisme kurikulum melalui pembelajaran di kelas. Ada semacam ‘penjinakkan’ terhadap guru dan murid yang dipraktekkan melalui serangkaian proses pembelajaran.

Sekolah dalam pandangan Giroux pada dasarnya menjadi manifestasi dari kontestasi berbagai pihak. Giroux, misalnya, mengatakan bahwa pendidik/guru memiliki peran penting dalam proses transformasi di kelas. Profesi pendidik itu bermartabat agung karena senantiasa mengembangkan intelektualitas transformatifnya. Namun demikian, peran guru tersebut termarjinalkan dari *mainstream* pendidikan yang berkembang; logika pasar. Peran guru menghilang dan digantikan dengan sosok guru sebagai tukang instruksi di kelas. Sementara itu dalam persaingan tersebut, Giroux melihat posisi murid secara lebih mendalam. Menurutnya, murid seharusnya diperjuangkan menjadi intelektual kritis, tetapi hanya menjadi pabrik kuli. Kekerasan yang terhadap dan antarsiswa didik mencerminkan buramnya institusi pendidikan yang tidak memiliki filsafat pendidikan. Padahal, dalam pandangan Giroux, hakikat pendidikan

adalah mentransformasikan nilai-nilai humanisasi subyek. Singkatnya, kekerasan yang terjadi akibat dominasi dan ketimpangan antara penguasa dengan masyarakat yang justru mendehumanisasikan keduanya.

Akibatnya, Giroux mengatakan sekolah dan universitas terjebak ke dalam pusaran logika pasar dan jargon kekuasaan (Giroux, dalam McClaren, 1995:11). Kedua lembaga pendidikan tersebut terseret dalam pusaran-pusaran ini dan berubah menjadi mesin yang mencetak tukang atau kuli ekonomi. Gagasan Giroux tentang *radical education* justru ingin menempatkan sekolah dan universitas sebagai ‘*public sphere*’ yang menjadikan murid dan mahasiswanya sebagai warga yang demokratis dan humanis sehingga tercipta a *radical democratic society* (Apple dalam Weis, 2006:203-204). Pada dasarnya, Apple dan Giroux memiliki cara pandang yang sama dalam melihat fenomena pendidikan. Apple melihat bahwa pasar merupakan elemen yang sangat determinan dalam menggerakkan pendidikan, khususnya menelaah sekolah. Berbeda dengan Giroux, ada beberapa fokus Apple dalam menelaah tema ini. *Pertama*, Apple melihat relasi antara kebijakan pendidikan dengan tingkat praksis serta relasi antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat yang lebih luas. *Kedua*, lebih jauh Apple melihat relasi antara dunia ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar dan dominasi kultural dalam konteks ekonomi-politik di dunia pendidikan. Dalam penjelasannya, Apple banyak menjelaskan keberadaan sekolah sebagai representasi dominasi dan pertarungan tersebut. Lebih jauh Apple dalam Giroux dan Purpel (1983:83) mengatakan bahwa :

"in advanced industrial societies, school becomes particularly important as distributors this cultural capital..."

Dominasi kultural dalam pandangan Apple dipahami sebagai implikasi sosio kultural kelompok berkuasa terhadap kelompok lainnya yang dianggap lebih lemah. Dengan demikian, ada reproduksi ketimpangan sosio kultural akibat berbagai distorsi praktek pendidikan yang terjadi di sekolah. Apple memang menjelaskan lebih mendalam tentang reproduksi ekonomi, kultural

dan ekonomi dalam sekolah khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Menurutnya :

"the study of interconnections between ideology and curriculum and between ideology and educational argumentation has important implications for the curriculum field and for educational theory and policy in general"

Berdasarkan pernyataannya itu, Apple sangat percaya bahwa relasi sosial antara pasar, ideologi dan kultural akan memberikan implikasi yang besar kepada kebijakan pendidikan di tingkat makro. Pada sisi itu, Apple menyetujui beberapa sosiolog pendidikan lainnya meyakini bahwa sekolah (dan universitas) harus dipahami sebagai *process knowledge institution* yang memiliki fungsi ideologis. Sekolah juga oleh Apple dianggap sebagai agen penting terciptanya reproduksi kultural, ekonomi maupun ideologis dalam masyarakat. Apple dan King (1983) mengatakan:

*"...it is important to realize that while our educational institutions do functions to distribute ideological values and knowledge...As a system of institutions, they also ultimately help produce the type of knowledge (as a kind of commodity) that is needed to maintain the dominant economic, political and cultural arrangements that now exist"*²¹

Apple mengatakan bahwa kurikulum merupakan sebuah ruang yang mempertahankan dominasi ekonomi, politik dan nilai-nilai budaya. Pandangan ini menegaskan bahwa sekolah melalui berbagai prosedur dan standar akademiknya—termasuk di dalamnya menggunakan kurikulum—memberikan basis legitimasi terhadap eksistensi kekuasaan ekonomi, politik dan ideologi. Pada level ini, Apple berupaya untuk lebih menjelaskan dinamika hegemoni, kekuasaan dan kontrol dalam kurikulum serta praktek-praktek pendidikan yang dilakukan guru. Fokusnya terletak pada bagaimana ideologi beroperasi dan menyebar membangun ke(tidak) sadaran diantara setiap individu.

Pandangan berbeda dijelaskan Torres (2006). Torres sebagaimana mengutip Levin menempatkan kurikulum (dan juga organisasi sekolah,

instruksi, metode pembelajaran) sebagai proses pendidikan dalam sebuah formasi kebijakan publik dalam ranah pendidikan. Torres menyebut dua faktor penting dalam formasi kebijakan publik yaitu pengaruh eksternal dan reformasi pendidikan-perencanaan pendidikan. Diantara dua faktor ini, Torres menjelaskan bahwa faktor eksternal berupa dimensi politik (politik, ekonomi, sosial, budaya, budaya, agama, sejarah), hukum dan sumber-sumber anggaran, serta proses pendidikan dianggap lebih determinan dalam menempatkan pendidikan sebagai ranah penting dalam masyarakat. Pada konteks kurikulum sebagai bagian penting proses pendidikan, Torres menyebutnya dengan *social outcomes* yaitu *competition, literacy, political behavior, alienation* dan sebagainya.

Penjelasan Apple dan Giroux tentang kurikulum sebagai ranah sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bourdieu (1977; 1991; 1993;) tentang konsepsinya sekolah hanya sebagai ruang terciptanya reproduksi sosial dan reproduksi ekonomi. Konsepsi Bourdieu memang lebih komprehensif dibandingkan dengan pemikiran Apple, Giroux maupun Torres. Tesis Bourdieu tersebut ingin mengatakan bahwa berbagai dinamika yang terdapat di sekolah diproduksi oleh kurikulum. *Pertama*, meski Bourdieu tidak berbicara khusus tentang kurikulum, tetapi pesan yang ingin disampaikan sangat terlihat bahwa kurikulum menjadi ranah penting dalam keberadaan sekolah. *Kedua*, melalui kurikulum terjadi pertarungan kekuasaan agen-agen di dalamnya. Dalam hal ini Bourdieu kemudian mengintrodusir konsep *field*. Dengan kata lain, kurikulum jika mengacu kepada Bourdieu merupakan sebuah ranah kekuasaan.

Dari hasil studi diatas menunjukkan bahwa negara tengah menjalankan praktek kekuasaannya melalui penggunaan seperangkat mekanisme wacana yaitu dengan pembentukan teks-teks pendidikan untuk menghasilkan berbagai kepatuhan berupa nilai, cara pandang dunia, dan sebagainya. Kurikulum sebagai bentuk kekuasaan digunakan negara dalam memproduksi berbagai cara pandang dunia yang harus sejalan dengan cara pandang negara, dalam hal ini BSNP sebagai agen dominan. Bourdieu memberikan gambaran hal-hal mendasar dalam hubungan antara

struktur sekolah secara piramida dengan struktur negara dimana ujian nasional yang notabene merupakan produk BSNP sebagai alat untuk mendaki suatu struktur piramida tersebut, yang disebut sebagai *state magic* (sihir negara). Sekolah sebagai agen sosialisasi utama mentransformasikan suatu warisan kolektif dalam suatu alam ketidaksadaran individu.

Dalam konteks pertarungan kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam studi ini, perspektif Bourdieu dengan berbagai proposisinya relevan untuk menjelaskan praktek-praktek kontestasi antar agen dalam ranah kurikulum. Bourdieu memberikan sebuah gambaran umum bagaimana memahami produksi dan reproduksi wacana sebagai representasi praktek sosial. Berbagai wacana (teks kurikulum dan buku teks pelajaran) dalam pandangan Bourdieu bukanlah gejala yang spontan.

Definisi Kurikulum Dalam Perspektif Sosiologi

Berdasarkan penjabaran teoritis di atas dapat digambarkan bahwa keempat perspektif yang ditawarkan memiliki penekanan masing-masing. Berdasarkan itu pula kurikulum merupakan: "sebuah ruang dimana para agen dengan kepentingan dan modalnya yang berbeda-beda saling bertarung untuk memperjuangkan posisi, pengaruh, prestis dan kedudukan". Kurikulum merupakan sebuah ranah pertarungan berbagai agen dengan habitus dan modalnya masing-masing untuk memperjuangkan berbagai modal yang diperjuangkannya. Kurikulum merupakan sebuah ruang dimana berbagai simbol diproduksi, didistribusikan kepada setiap agen.

Dalam kontestasi tersebut terjadi ketidaksetaraan dalam pendistribusian berbagai kapital. Akibatnya, melahirkan posisi dominan dari agen tertentu. Dengan demikian, tidak dipungkiri selalu terkondisikan adanya kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terhadap agen tertentu oleh kelompok dominan. Maka, kurikulum juga dapat dipahami sebagai mekanisme melahirkan kepatuhan dan penjinakkan kepada guru serta murid dari pihak-pihak lainnya. Kurikulum juga menjadi bentuk kontrol yang lebih langsung yang sering menjadi sasaran perhatian kekerasan simbolik terhadap agen. Agen-agen yang terlibat dalam kontestasi kurikulum sangat ditentukan oleh kekuatan

simbolik (*symbolic power*) yaitu kekuasaan dalam mengendalikan simbol dan mengkonstruksi realitas melalui simbol-simbol tersebut.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan konseptualisasi ke-4 pemikiran tersebut maka penulis berpendapat bahwa kurikulum merupakan sebuah *field*, yaitu serangkaian arena/ranah, tempat pelaku sosial bertarung menggunakan habitus dan kapital yang mereka miliki secara efisien, untuk memperoleh bermacam-macam bentuk kapital lain. Pada sisi lain, kurikulum juga dapat dipahami sebagai pasar tempat berlangsungnya pertukaran berbagai jenis kapital, tempat individu saling bersaing dengan tujuan untuk mengubah ketidakseimbangan distribusi kapital yang terjadi.

Menempatkan kurikulum sebagai *field* menjadi strategis untuk membongkar terjadinya pertarungan kekuasaan tersebut. Negara dalam konsepsi tersebut dipahami sebagai institusi yang mengoperasionalkan kekuasaannya. Tepatnya, dalam pengaturan pendidikan melalui kebijakan kurikulum yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi dengan aktor lainnya. Negara mengatur pendidikan melalui kekuasaannya dalam merancang dan melaksanakan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Saran

Setelah melakukan kajian mendalam mengenai kurikulum sebagai kajian sosiologi, perlu dilakukan diskusi dan kajian lebih mendalam tentang kurikulum dalam berbagai aspek. Selama ini kajian tentang kurikulum lebih banyak ditekankan pada kajian pedagogik yang lebih menempatkan kurikulum sebagai kajian mikro. Kurikulum lebih ditempatkan pada proses pembelajaran di dalam kelas antara guru dengan murid. Pemikiran beberapa sosiolog sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini mencoba melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kajian tentang Sosiologi Kurikulum harus mendapatkan perhatian utama dari dunia pendidikan terutama menjadi mata kuliah wajib bagi jurusan-jurusan kependidikan seperti FKIP/STKIP maupun Perguruan Tinggi Negeri eks IKIP, sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswa calon guru mampu

memahami secara lebih komprehensif kajian kurikulum. Mereka akan menemukan benang merah bahwa kurikulum merupakan kunci penting

dari pendidikan yang berlangsung dalam suatu masyarakat.

Pustaka Acuan

- Adnan, Ricardi S., 1992, *Pengaruh Kurikulum Terselubung terhadap Keberhasilan Siswa SMA; Studi Kasus SMAN 8 Jakarta*, Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi, FISIP UI, Depok (tidak dipublikasikan).
- Alkin, Malkin C, 1992, *Encyclopedia of Educational Research* (Sixt Edition), Macmillan Library.
- Apple, Michael W. 1990. *Ideology and Curriculum*. New York-London: Routledge.
- Bestor, Arthur E, Jr. 1956. *The Restoration of Learning*, New York: Knopf
- Bourdieu, Pierre, 1977. *Cultural Capital and Social reproduction* dalam Karabel, Jerome dan A.H. Halsey (1977). (ed). *Power and Ideology in Education*. New York; Oxford University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1993. *The Field of Cultural Production*. Cambridge: Polity Press
- Darder, Antonia. Et. Al, 2003. (ed). *The Critical Pedagogy Reader*. New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. *Kurikulum 1994: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi Kurikulum dan Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Fibra, Adsina, 2002. *Kurikulum Tersembunyi dalam Pendidikan Sekolah Dasar Katolik; Kasus SD Fransiskus Bukit Tinggi, Sumatera Barat*, Skripsi Sarjana Departemen Antropologi, FISIP UI, Depok (tidak dipublikasikan).
- Giroux, Henry dan David Purpel (ed), (1983), *The Hidden Curriculum and Moral Education*, California: McCutchan Publishing Corporation
- Giroux, Henry A, 1992. *Border Crossing; Cultural Workers and The Politics of Education*, New York: Rotledge.
- Hutchins, R.M. 1936. *The Higher Learning in America*. Yale: New Haren
- Karhami, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar & Menengah (Upaya Menyeimbangkan Tiga Kepentingan: Masyarakat-Pembelajar-Keilmuan)* dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 024, Tahun ke-6, Juli 2000.
- Keputusan Presiden RI No. 145/Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusan MPR No. II/MPR/1973 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto selaku Mandataris MPR
- Kusumo, 2004. *Pendidikan Sebelum Masa Kolonial* dalam Salim (2004). *Indonesia Belajarlah; Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani.
- Levey. 1993. (ed). *School Dictionary 3*, New York: MacMillan/McGraw-Hill.
- McClaren, Peter, 1995, *Critical Pedagogy and Predatory Culture; Oppositional Politics in Postmodern Era*, London: Routledge.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Phenix, PH., 1962. *The Discipline as Curriculum Content*, in A Harry Passow (ed). *Curriculum Crossroads: Report of a Curriculum Conference*. New York: Bureau of Publications Teacher

- Seda, Francisia SSE. 1987, *Kurikulum Terselubung dan Modernitas Individu (Suatu Studi Kasus Mengenai Sekolah sebagai Agen Sosialisasi)*, Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi FISIP UI, Jakarta (tidak dipublikasikan)
- Suryana, *Pendidikan Masa Kolonial* dalam Salim, 2004. *Indonesia Belajarlah: Membangun Pendidikan Indonesia*. Semarang: Gerbang Madani.
- Silverius, *Masa Depan Kurikulum Masa Depan*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 046, Tahun Ke-10, Januari 2004.
- St Kartono, *KTSP Menuju Kurikulum "Less Is More"* dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0611/21/jogja/1030938.htm>-Selasa, 21 November 2006
- Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
- Tilaar, H.A.R. 1995, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Tilaar, H.A.R.2003. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: IndonesiaTera.
- Torres, Carlos Alberto. 2006. *Schooling, Power, and The Exile of The Soul* dalam Weis, Louis, et. Al (2006). (ed). *Ideology, Curriculum, and the New Sociology of Education*. New York-London: Routledge.
- Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
- Undang-Undang No. 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Weis, Lois et.al (2006) (ed), *Ideology, Curriculum, and The New Sociology of Education (Revisiting the Work of Michael Apple)*, New York: Routledge.
- Zed, Mestika, *Ilmu Sosial Indonesia dalam Wacana Methodenstrein* dalam Abdullah, Taufiq (ed), 2006. *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada